

# INDEKS KABUPATEN PASER PEMBANGUNAN MANUSIA 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PASER**



# INDEKS KABUPATEN PASER PEMBANGUNAN MANUSIA 2018



# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PASER**

## **TAHUN 2018**

<b>No. Katalog</b>	<b>:</b>	<b>4102002.6401</b>
<b>No. Publikasi</b>	<b>:</b>	<b>64.015.17.18</b>
<b>Ukuran buku</b>	<b>:</b>	<b>17,6 cm x 25 cm</b>
<b>Jumlah halaman</b>	<b>:</b>	<b>xiii + 55 halaman</b>
<b>Naskah</b>	<b>:</b>	<b>Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser</b>
<b>Penyunting</b>	<b>:</b>	<b>Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser</b>
<b>Gambar Kulit</b>	<b>:</b>	<b>Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser</b>
<b>Diterbitkan oleh</b>	<b>:</b>	<b>Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser</b>
<b>Dicetak oleh</b>	<b>:</b>	<b>CV. SUVI SEJAHTERA</b>

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**



## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum :**

Ir. Bahramsyah

### **Penyunting :**

Maulana Malik Herdianto, S.Si.

### **Penulis :**

Yosi Octaviani Simanjuntak, SST

### **Pengolah Data :**

Yosi Octaviani Simanjuntak, SST

### **Gambar Kulit:**

Muhammad Ricky Pranata, SST

Yosi Octaviani Simanjuntak, SST



# KATA PENGANTAR

Penerbitan publikasi "**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser Tahun 2018**" dimaksudkan untuk memantau perkembangan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Paser dalam beberapa kurun waktu terakhir. Terjadi perubahan metode perhitungan dalam menghitung angka IPM, muatan yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa indikator tunggal sebagai pembentuk indikator komposit IPM. Indikator-indikator IPM dengan menggunakan metode perhitungan baru meliputi indikator angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan angka paritas daya beli (kemampuan daya beli) masyarakat.

Penyusunan publikasi ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser. Harapan kami, semoga apa yang kami sajikan dalam publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pihak pemerintah daerah Kabupaten Paser di dalam melakukan evaluasi pembangunan dan penyusunan program-program pembangunan di masa mendatang.

Penghargaan tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Selanjutnya, kritik dan saran bagi perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Tana Paser, Desember 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Paser,



**Ir. Bahramsyah**





# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	5
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data .....	5
<b>BAB II METODOLOGI .....</b>	<b>7</b>
2.1. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	10
2.2. Metode Penghitungan IPM .....	15
2.3. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM .....	17
2.4. Ukuran Perkembangan IPM .....	19
2.5. Definisi Indikator Operasional Terpilih .....	19
<b>BAB III GAMBARAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PASER .....</b>	<b>23</b>

	<b>Halaman</b>
BAB IV GAMBARAN UMUM, SOSIAL, DAN EKONOMI KABUPATEN PASER .....	29
4.1. Gambaran Umum .....	31
4.2. Gambaran Pendidikan .....	33
4.3. Gambaran Kesehatan .....	38
4.4. Gambaran Standar Hidup Layak .....	41
 BAB V PENUTUP.....	 45
5.1. Kesimpulan .....	47
5.2. Saran .....	47
 LAMPIRAN.....	 49

<https://paserkab.bps.go.id>



# DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser, Tahun 2013 – 2017 .....	25
3.2. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser dan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013 – 2017 .....	26
4.1. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Paser, Tahun 2013 – 2017.....	34
4.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Paser, Tahun 2013-2017 .....	35
4.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Paser, 2017 .....	37
4.4. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Paser, Tahun 2013 – 2017.....	38
4.5. Perkembangan Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Kabupaten Paser, Tahun 2013 – 2017.....	39
4.6. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang disesuaikan Kabupaten Paser Tahun 2013-2017 .....	41
4.7. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2017 .....	42
4.8. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Paser, Tahun 2017 .....	43
4.9. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Paser, Tahun 2017 .....	44

<https://paserkab.bps.go.id>



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru Perhitungan IPM .....	10
2.2. Tahapan Penghitungan Riil .....	14
2.3. Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Penyusun IPM.....	18
4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2013-2017 .....	32
4.2. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Kelompok Umur Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017 .....	37
4.3. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Paser Tahun 2013-2017 .....	40



# DAFTAR LAMPIRAN

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Shared Kelompok Komoditas dalam Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP).....	51
2. Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 -2017 .....	52
3. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2017.....	52
4. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2017.....	53
5. Pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2017 .....	53
6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2017.....	54
7. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2017.....	54
8. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2017.....	55





# PENDAHULUAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*"Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel."*

Dimensi pembangunan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industry.
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah.

*"Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang."*

Kalimat pembuka pada *Human Development Report (HDR)* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Hal ini didukung dengan babak baru agenda pembangunan dunia dengan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* sejak akhir tahun 2015. Meskipun secara eksplisit pembangunan manusia tidak langsung menjadi tujuan, terdapat beberapa target yang menyinggung tentang pembangunan manusia yaitu tujuan ketiga, keempat, dan kedelapan di antaranya: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; menjamin kualitas Pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pada era kepemimpinan Joko Widodo, dikenal istilah Nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan yang terdiri dari 9 butir. Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal itu dilakukan melalui dua program, yaitu:

1. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”,
2. peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Sama halnya dengan pemerintahan Kabupaten Paser, pembangunan manusia juga tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” yang terwujud dalam misinya yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi dan Pemukiman;
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan;
5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal.

Prioritas Pembangunan daerah berturut-turut meliputi: Infrastruktur jalan dan jembatan, Pendidikan, Kesehatan, Listrik, Air Bersih, Rumah Layak Huni, dan Pertanian dalam arti luas.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-

program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Paser, khususnya terkait dengan masalah pembangunan manusia. Oleh karena itu penerbitan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipandang perlu sebagai sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Paser. Selain itu, dengan adanya publikasi tersebut diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

## 1.2. Tujuan

Secara umum maksud penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser Tahun 2017 antara lain bertujuan untuk:

- a. Menyediakan informasi yang dasar dan lengkap mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perkembangannya dari tahun ke tahun di Kabupaten Paser yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan.
- b. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan anggaran, terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

## 1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini didasarkan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS, secara sampel di wilayah Kabupaten Paser.



# METODOLOGI







## BAB II

### METODOLOGI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM di suatu wilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu 100. Dengan kata lain, reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal.

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru). Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. **Angka Melek Huruf (AMH)** sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
2. **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus **rata-rata aritmatik** dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

- Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam Pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capain di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Tabel 2.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru Penghitungan IPM

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pengeluaran}}$		Rata-rata Geometrik $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pengeluaran}) \times 100$	

## 2.1. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup *up to date* dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olahraga, dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas

non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah yaitu kesederhanaannya di dalam proses penghitungannya. Disamping itu juga, data yang digunakan untuk menghitung IMH ini pada umumnya sudah banyak tersedia.

Dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan pembangunan yang ada, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan. Untuk itu diperlukan indikator lain yang lebih representatif dengan tuntutan permasalahan yang berkembang. Dalam hal ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; *Human Development Index*) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Index* (PPP). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH.

## 1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Untuk mengukur usia hidup, BPS menggunakan ukuran atau indikator angka harapan hidup waktu lahir atau *life expectancy at birth* (AHH). Tampaknya tidak ada yang

meragukan AHH sebagai ukuran usia hidup. Yang perlu dicatat adalah bahwa disperspektif konsep pembangunan manusia yang ingin diukur sebenarnya tidak hanya dari segi usia panjang sebagaimana terefleksikan dalam AHH, tetapi juga segi "sehat". Tetapi yang terakhir ini sulit dioperasionalkan. Selain itu, karena UNDP juga menggunakan AHH sebagai IPM global maka angkanya dapat dibandingkan secara internasional.

Angka AHH yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis IPM Tahun 2014 bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2014 KOR. Penghitungan dilakukan berdasarkan dua (2) data dasar, yaitu rata-rata ALH (anak lahir hidup) dan rata-rata AMH (anak masih hidup) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan AHH dilakukan dengan metode tidak langsung (*indirect technique*). Pada Komponen Angka Harapan Hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

## **2. Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)**

Untuk mengukur dimensi pengetahuan, BPS menggunakan 2 (dua) indikator yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak lahir. Proses Penghitungannya dengan perbandingan bobot 1 untuk HLS dan 1 untuk RLS. Pada metode sebelumnya, HLS tidak dipergunakan dan masih menggunakan variabel angka melek huruf. Namun angka melek huruf sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Sehingga BPS mengganti ukuran melek huruf dengan ukuran harapan lama sekolah. Alasan penggantian tersebut ialah mengikuti standar UNDP. UNDP telah menggunakan metode baru sejak tahun 2010 dan disempurnakan tahun 2011. Selain itu angka melek huruf sudah sangat tinggi untuk semua wilayah. sebenarnya tidak lagi menggunakan RLS sebagai komponen IPM dan diganti dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), tetapi alasan yang dikemukakan adalah pengumpulan data secara internasional, bukan alasan substansial. Secara substansial RLS yang merupakan indikator dampak diakui lebih unggul dari APS yang merupakan indikator proses sebagai komponen IPM. Karena alasan itu BPS tetap menggunakan RLS sebagai

komponen IPM. Sumber data yang digunakan untuk menghitung HLS dan RLS adalah SUSENAS 2014 KOR.

### 3. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*)

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (atau mudahnya daya beli), Dalam cakupan lebih luas Standar Hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Dalam pengaplikasian metode perhitungan IPM yang baru UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *GNP<sub>adjusted</sub>* atau disebut PNB (produk nasional bruto) perkapita. Penggantian variable PDB menjadi PNB dengan alasan PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat disuatu wilayah. Untuk keperluan penghitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota), BPS tidak menggunakan produk nasional bruto yang kira-kira setara dengan ukuran yang digunakan UNDP. Alasannya karena hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Sebagai penggantinya, BPS menggunakan indikator dasar rata-rata pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat riil dengan tahun dasar 2012=100.

$$\bar{Y}'_t = \frac{\bar{Y}_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan :

$\bar{Y}'_t$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

$\bar{Y}_t$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$  = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

Penghitungan indikator dasar rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan sedemikian rupa untuk menjamin keterbandingan antar waktu dan daerah di Indonesia.

Sehubungan dengan belum tersedianya data IHK (Indeks harga Konsumen) Kabupaten Paser dan untuk keperluan perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka dalam penghitungan paritas daya beli digunakan IHK Kota Jakarta Selatan. IHK sementara ini hanya dihitung di 54 kota di seluruh Indonesia.

**Tabel 2.2. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil**

Tahap	Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari data SUSENAS KOR ( $=\bar{Y}$ )	(Harga berlaku)
2	Menghitung rata-rata pengeluaran perkapita pertahun dalam ribuan ( $\bar{Y}_t = \bar{Y} \times \frac{12}{1000}$ )	(Harga berlaku)
3	Menghitung angka riil $Y_1$ dengan menggunakan IHK ( $\bar{Y}'_t$ )	$\bar{Y}'_t = \bar{Y}_t / IHK$ (Harga Konstan)
4	Menghitung indeks "kemahalan" suatu wilayah	
5	Menyesuaikan berdasarkan PPP/unit ( $\bar{Y}''_t$ )	$= (\bar{Y}''_t = (\bar{Y}'_t)) / (PPP/unit)$ . Langkah ini untuk menjamin nilai rupiah yang standar

Indeks "kemahalan" suatu wilayah dihitung berdasarkan perbandingan kuantitas dan harga antar wilayah dari sejumlah komoditi sebagaimana yang dilakukan oleh *International Comparison Project/ICP* dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Indeks kemahalan diperlukan untuk menstandarkan nilai "beli" rupiah di semua daerah di Indonesia.

Formula PPP

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

$P_{ij}$  : Harga komoditas i di kab/kota j

$P_{ik}$ : Harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : Jumlah komoditas

Langkah berikutnya menghitung pengeluaran perkapita disesuaikan dengan cara:

$$\bar{Y}''_t = \frac{\bar{Y}'_t}{PPP_j}$$

Keterangan:

$\bar{Y}''_t$  : Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan

$\bar{Y}'_t$  : Rata-rata pengeluaran perkapita pertahun atas dasar harga konstan 2012

PPP : Paritas daya beli

## 2.2. Metode Penghitungan IPM

Ukuran umum yang dipakai untuk mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990), adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang / peluang hidup (*longevity*) yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir, (2) pendidikan/pengetahuan (*knowledge*) yang diwakili oleh rata-rata antara harapan lama sekolah penduduk usia dewasa dengan rata-rata lama sekolah dan (3) standar kehidupan layak (*decent living*) yang diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Peluang hidup diukur dengan angka harapan hidup atau  $e_0$  yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data SUSENAS. Indikator angka harapan lama sekolah diperoleh dari variabel lama sekolah, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Sedangkan UNDP menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

### Tingkat Kesehatan:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

$I_{kesehatan}$  : Indeks kesehatan

AHH : Angka harapan hidup

$AHH_{min}$  : Angka harapan hidup minimal

$AHH_{max}$  : Angka harapan hidup maksimal

**Tingkat Pengetahuan:**

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$I_{pengetahuan}$  : Indeks Pengetahuan

$I_{HLS}$  : Indeks Harapan Lama Sekolah

$I_{RLS}$  : Indeks Rata-rata lama sekolah

Untuk mendapatkan nilai  $I_{pengetahuan}$  sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu nilai-nilai dari  $I_{HLS}$  dan  $I_{RLS}$ . Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

HLS : Harapan lama sekolah

$HLS_{min}$  : Harapan lama sekolah minimal

$RLS_{max}$  : Harapan lama sekolah maksimal

RLS : Rata-rata lama sekolah

$RLS_{min}$  : Rata-rata lama sekolah minimal

$RLS_{max}$  : Rata-rata lama sekolah maksimal

Harapan Lama sekolah memiliki perhitungan tersendiri dengan rumus umum:



$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

$HLS_a^t$ : Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t

FK: Faktor koreksi pesantren

$E_i^t$ : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$ : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i: usia (a, a+1, ..., n)

koreksi pesantren yang digunakan bertujuan untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas. Sumber data pesantren yaitu dari direktorat pendidikan islam.

#### Tingkat Pengeluaran:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

### 2.3. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Setelah diketahui nilai dari masing-masing indikator tersebut, langkah selanjutnya adalah cara menghitung nilai agregasi atau nilai Indeks Pembangunan Manusia dengan rata-rata ukur/ rata-rata geometri.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Dalam setiap perhitungan indikator, baik indikator kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran menggunakan nilai maksimum dan minimum tertentu yang telah ditentukan. Pada perhitungan dengan metode baru ini, nilai maksimum dan minimum setiap variable mengacu pada UNDP.

**Tabel 2.3. Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Penyusun IPM  
Menurut UNDP dan BPS**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352* * (Rp)

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Batas maksimum dan minimum untuk semua indikator mengacu pada UNDP kecuali untuk indikator pengeluaran/ daya beli. Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua. Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan/tingkatan status yaitu rendah (kurang dari 60), sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) dan sangat tinggi (lebih dari sama dengan 80). Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tingkatan Status	Kriteria
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

## 2.4. Ukuran Perkembangan IPM

Lebih lanjut, angka IPM suatu daerah menunjukkan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100. Namun dengan metode yang baru untuk mengukur percepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM pertahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Perhitungan pertumbuhan IPM metode baru dilakukan dengan rumus pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

$IPM_t$  = IPM suatu wilayah pada tahun ke-t

$IPM_{t-1}$  = IPM suatu wilayah pada tahun ke-t-1

## 2.5. Definisi Operasional Indikator Terpilih

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :

### Rasio jenis kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.

### Persentase rumah tangga beratap layak

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dedaunan).

### Persentase rumah tangga berdinding permanen

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding permanen (tembok atau kayu).

**Persentase rumah tangga berlantai bukan tanah**

Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai bukan tanah.

**Persentase rumah tangga bersumber air minum ledeng**

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum ledeng.

**Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih**

Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa/sumur/mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah/kotoran terdekat.

**Persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar berjenis leher angsa**

Proporsi rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar berjenis leher angsa .

**Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septic**

Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septic rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

**Angka Harapan Hidup**

**Jumlah Penduduk usia sekolah**

Banyaknya penduduk usia 7 sampai 24 tahun

**Angka Partisipasi Sekolah**

Proporsi penduduk yang sedang bersekolah terhadap jumlah penduduk setiap kelompok usia sekolah

**Angka Harapan Lama Sekolah**

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

**Rata – Rata Lama Sekolah**

Rata – rata jumlah tahun yang dijalani untuk menempuh semua jenis pendidikan formal oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas (standard UNDP) yang mana metode sebelumnya usia 15 Tahun keatas. Asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

**Paritas Daya Beli**

Pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan *utilitas marginal*

<https://paserkab.bps.go.id>



# GAMBARAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



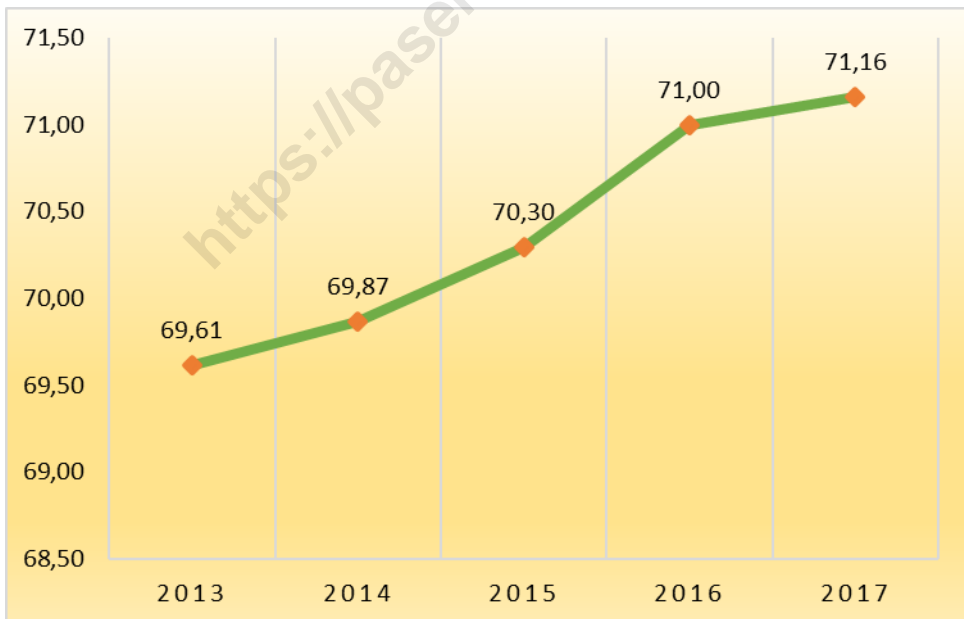




### BAB III

## GAMBARAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

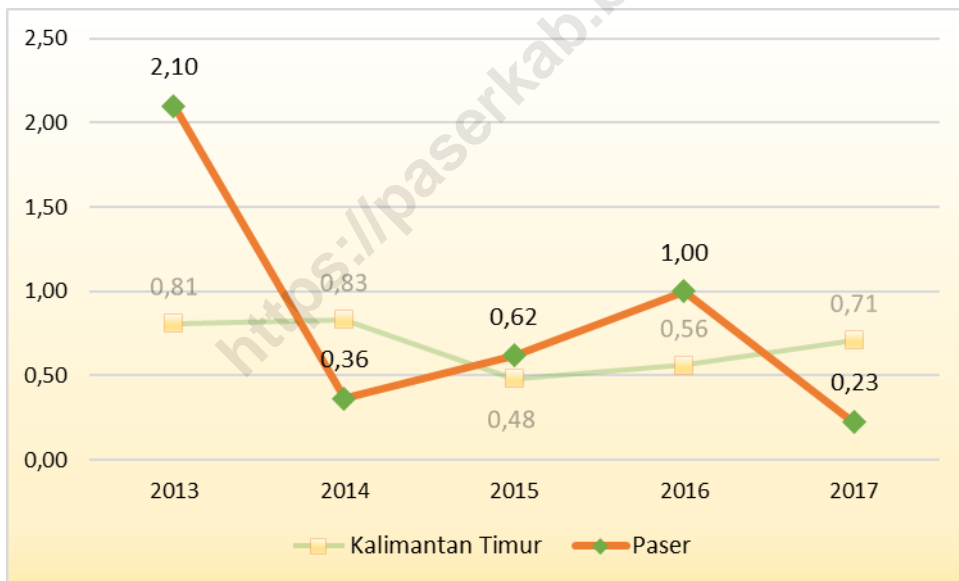
Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin baik pula pencapaian pembangunannya. Angka IPM tersebut juga dapat digunakan sebagai suatu ukuran yang dapat membandingkan posisi relatif pembangunan manusia antar kabupaten/kota di wilayah Indonesia, khususnya bagaimana posisi pembangunan manusia Kabupaten Paser untuk wilayah Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Kabupaten Paser

Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Paser dengan menggunakan metode perhitungan baru cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Paser menduduki peringkat ke-7 untuk wilayah se-Kalimantan Timur, masih sama seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, selama lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Paser mengalami peningkatan dari 69,61 pada tahun 2013 menjadi 71,16 pada tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa status pembangunan manusia Kabupaten Paser termasuk tinggi dan semakin mendekati angka 100. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, pembangunan manusia Kabupaten Paser berhasil mengubah status dari sedang menjadi tinggi dan tetap bertahan dalam status tinggi, bahkan cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun. Secara umum, IPM Kabupaten Paser tahun 2017 menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Paser yang menurut standar UNDP tentang klasifikasi IPM berada pada tingkat tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Paser

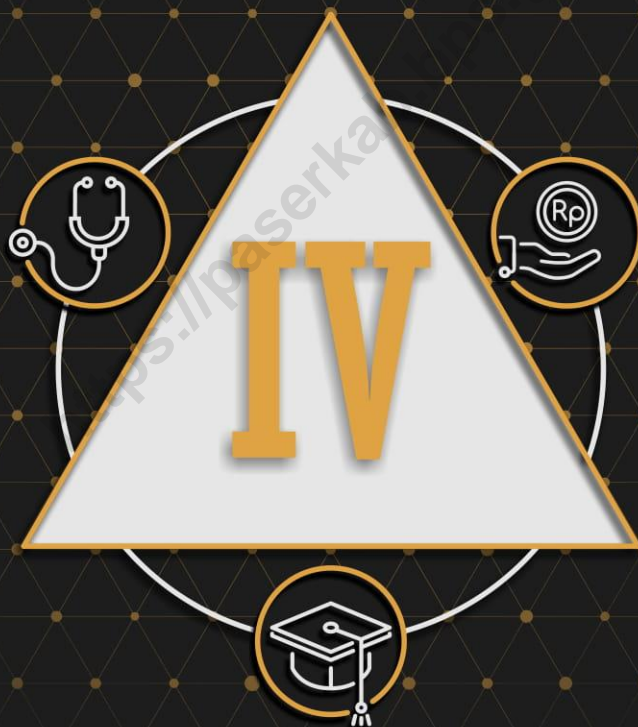
Gambar 3.2. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Untuk melihat tingkat kelajuan peningkatan IPM dalam suatu periode pada wilayah tertentu dapat dilihat dari angka pertumbuhan IPM yang dihasilkan. Angka ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai

maksimalnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Paser dari tahun 2016 ke 2017 mengalami perlambatan menjadi 0,23. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan IPM yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,1 persen dan paling rendah terjadi pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2015, Kabupaten Paser sempat mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur, namun pada tahun 2017 pertumbuhan IPM Kabupaten Paser berada di bawah pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,71 persen. Meskipun pertumbuhan IPM tidak terlalu tinggi, paling tidak upaya peningkatan pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Paser telah menunjukkan keberhasilan yang semakin baik setiap tahunnya. Hal ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah guna menggalakkan kembali upaya pemerintah dalam hal pemberdayaan manusia melalui berbagai program pembangunan daerah khususnya dalam meningkatkan kemajuan (*achievement*), kebebasan (*freedom*), dan kapabilitas (*capability*) penduduk Kabupaten Paser.



# GAMBARAN UMUM, SOSIAL, DAN EKONOMI KABUPATEN PASER





## BAB IV

# GAMBARAN UMUM, SOSIAL, DAN EKONOMI

## KABUPATEN PASER

Peningkatan IPM tersebut juga dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia semestinya dapat ditunjukkan dengan meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya pengetahuan penduduk dan juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

### 4.1. Gambaran Umum



Wilayah Kabupaten Paser terletak di ujung selatan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Paser terletak di antara  $115^{\circ} 37' 0.77''$  -  $118^{\circ} 1' 19.82''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 48' 29.44''$  -  $2^{\circ} 37' 24.21''$  Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan yang terbagi menjadi 139 desa dan 5 kelurahan. Adapun luas wilayah Kabupaten Paser adalah  $11.603,94 \text{ km}^2$  dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
- Sebelah Timur Laut : Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sebelah Timur : Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
- Sebelah Tenggara : Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
- Sebelah Barat Daya : Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan)

Sebelah Barat : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Sebelah Barat Laut : Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

Sasaran pembangunan manusia adalah penduduk daerah yang bersangkutan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan manusia adalah masalah kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Karakteristik penduduk sangat memiliki pengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial-ekonomi penduduk yang biasanya dilihat dari struktur umur dan jenis kelamin. Gambaran lebih jelas tentang jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>249.991</b>	<b>256.175</b>	<b>262.301</b>	<b>268.261</b>	<b>274.206</b>
Laki-laki	132.722	135.925	139.219	142.377	145.430
Perempuan	117.269	120.250	123.082	125.884	128.776
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>2,41</b>	<b>2,47</b>	<b>2,39</b>	<b>2,27</b>	<b>2,22</b>
<b>Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)</b>	<b>113,18</b>	<b>113,04</b>	<b>113,11</b>	<b>113,10</b>	<b>112,93</b>
<b>Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>)</b>	<b>21,34</b>	<b>22,08</b>	<b>22,60</b>	<b>23,12</b>	<b>23,63</b>
<b>Penduduk menurut kelompok umur (%)</b>					
0-14	31,81	30,67	30,01	28,84	28,47
15-64	65,75	66,84	67,69	68,13	68,33
65+	2,44	2,49	2,31	3,03	3,20
<b>Rasio Beban Tanggungan (%)</b>	<b>52,09</b>	<b>49,61</b>	<b>47,74</b>	<b>46,77</b>	<b>46,36</b>

Sumber : BPS Kabupaten Paser (Proyeksi Penduduk pertengahan tahun)

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun secara absolut terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 268.261 jiwa dan bertambah menjadi 274.206 jiwa pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,22 persen. Hal tersebut dapat memberikan gambaran yang



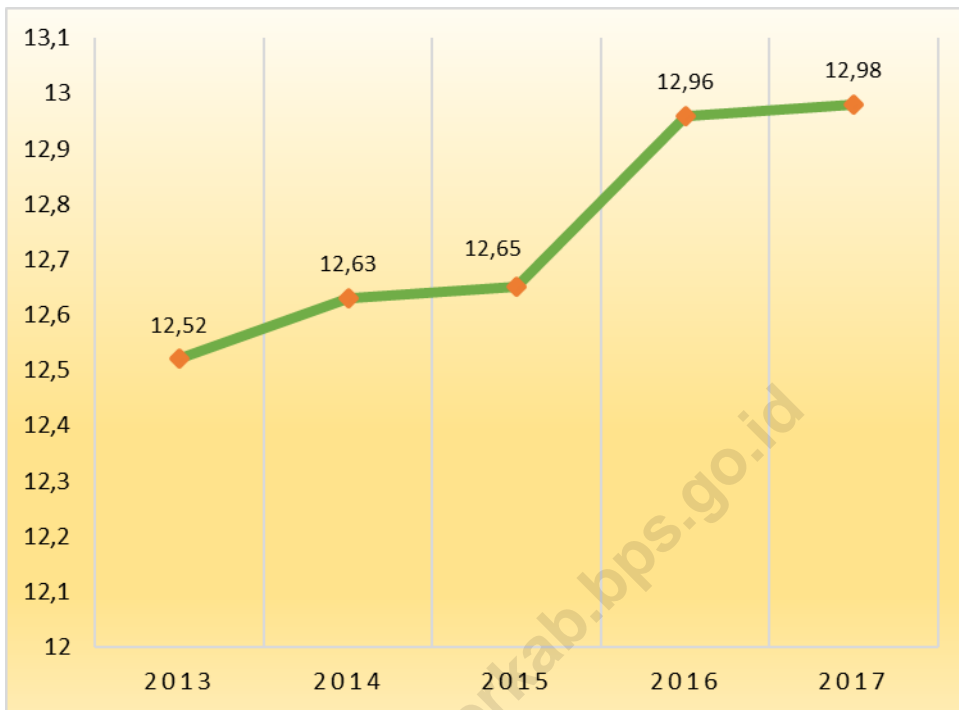
jelas tentang meningkatnya kepadatan penduduk setiap tahun. Seperti yang tertera pada tabel 4.1. bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Paser telah mencapai 23,63 jiwa/km<sup>2</sup>.

Rasio jenis kelamin (RJK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan, dan bila nilai RJK penduduk disuatu wilayah di atas seratus berarti proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa dari tahun 2013-2017, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat jelas dari rasio jenis kelamin penduduk yang selalu berada di atas seratus. Adapun rasio jenis kelamin Kabupaten Paser pada tahun 2017 yaitu sebesar 112,93.

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan berimplikasi juga terhadap Rasio Beban Tanggungan Total dimana semakin kecil rasio beban tanggungan, semakin berhasil pula pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Paser Tahun 2017 lebih rendah dari pada tahun 2016. Pada tahun 2016, angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Paser sebesar 46,77 persen dan pada tahun 2017 sebesar 46,36 persen. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 sampai 47 penduduk usia non produktif. Penurunan angka tersebut menunjukkan semakin kecilnya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten Paser.

#### **4.2. Gambaran Pendidikan**

Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Berbekal pendidikan yang cukup, setiap individu dituntut dengan kemampuannya sendiri dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup secara lebih layak. Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM.



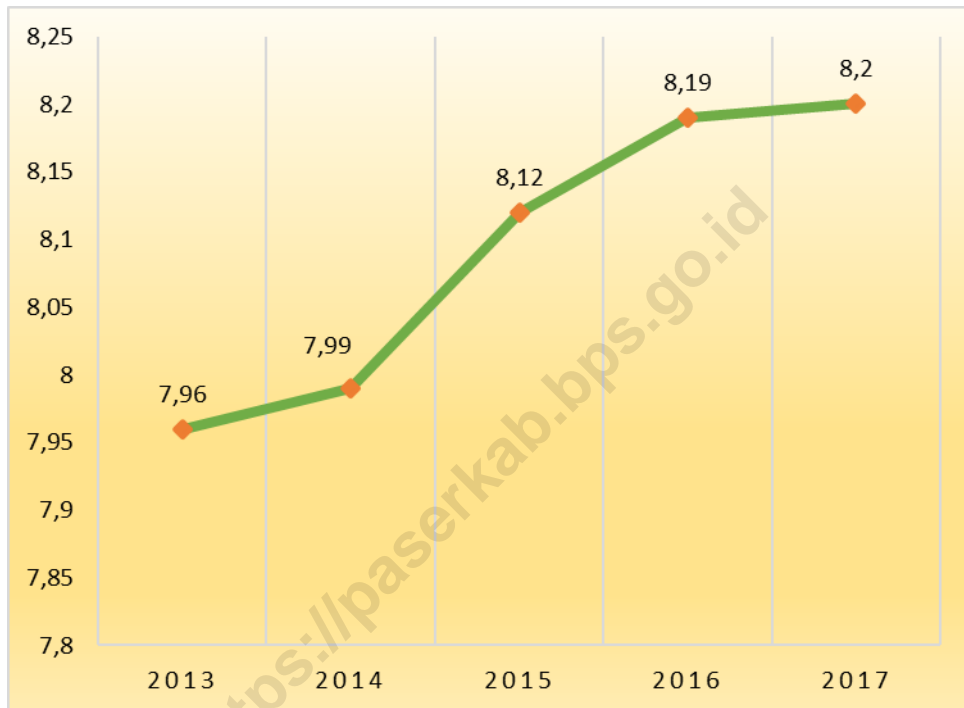
Sumber: BPS Kabupaten Paser

Gambar 4.1. Perkembangan HLS Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Gambar di atas menunjukkan bahwa HLS Kabupaten Paser pada tahun 2017 sebesar 12,98 tahun. Hal tersebut berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 sampai 13 tahun atau setara dengan Diploma 1. Selama lima tahun terakhir, harapan lama sekolah Kabupaten Paser mengalami peningkatan dari 12,52 tahun pada 2013 menjadi 12,98 tahun pada 2017.

Biaya pendidikan semakin mahal dari waktu ke waktu, baik itu biaya pembelajaran maupun keperluan lainnya. Hal itu kerap sekali menjadi alasan masyarakat memutuskan untuk putus sekolah karena tidak mampu membiayai uang sekolah dan buku sehingga memilih untuk bekerja. Sementara itu, pemerintah juga tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya pendidikan masyarakatnya dikarenakan terbatasnya anggaran pendidikan. Fenomena ini sangat disadari pemerintah sehingga ditetapkanlah beberapa strategi yang mampu mengalokasikan anggaran secara efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kabupaten Paser, di antaranya Wajib Belajar 9 tahun melalui program

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS), pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dan pengembangan PAUD serta pendidikan non formal.



Sumber: BPS Kabupaten Paser

Gambar 4.2. Perkembangan RLS Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

Angka RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Adapun informasi yang dibutuhkan dalam perhitungannya adalah partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Angka RLS Kabupaten Paser tahun 2017 sebesar 8,2 tahun yang berarti secara rata-rata, jumlah tahun belajar penduduk Kabupaten Paser yang berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal adalah 8 sampai 9 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka RLS tersebut masih lebih kecil daripada angka HLS yang

memiliki selisih sekitar 4 tahun. Angka RLS Kabupaten Paser masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 9,36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Paser masih belum sesuai harapan dan masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur secara rata-rata sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menggalakkan pelaksanaan dan pengawasan program pendidikan ke depannya.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa komponen, salah satunya adalah angka partisipasi sekolah. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. Untuk memonitor kemajuan partisipasi pendidikan dalam program ini, pemerintah menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan suatu indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah berpartisipasi dalam dunia pendidikan melalui jumlah penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. Pendidikan suatu daerah menunjukkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan dari daerah yang bersangkutan. Bila suatu daerah memiliki persentase penduduk yang tinggi dalam partisipasi sekolah, maka dapat dikatakan bahwa penduduk daerah tersebut memiliki wawasan masa depan dan memiliki kemampuan finansial yang bagus, sekaligus juga menggambarkan tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM). Aspek pendidikan dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya angka partisipasi sekolah yang ditampilkan dalam kelompok umur, yakni kelompok 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Walaupun tidak merupakan suatu angka mutlak, kelompok partisipasi sekolah 7-12 tahun akan dapat diparalelkan sebagai angka partisipasi sekolah untuk SD/MI. Kelompok 13-15 tahun akan mempresentasikan angka partisipasi sekolah untuk tingkat SLTP/MTs, kelompok umur 16-18 tahun akan menunjukkan angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMU/SMK/MA. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 dan usia 13-15 tahun menunjukkan persentase angka paling besar dibandingkan dua kelompok jenjang pendidikan lainnya. Tingginya angka partisipasi sekolah pada dua jenjang kelompok umur pendidikan di atas sejalan dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Sedangkan untuk kelompok umur lainnya, rendahnya angka partisipasi sekolah yang dicapai mungkin lebih disebabkan pada faktor kemampuan ekonomi rumah tangga di dalam



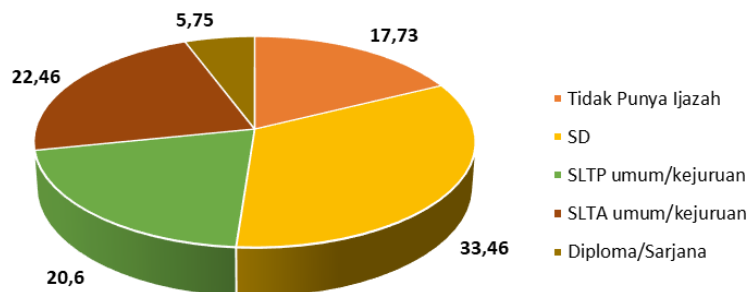
memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anggota rumah tangganya dan keterbatasan sarana pendidikan pada jenjang pendidikan kelompok umur tersebut yang mampu menjangkau sampai pada wilayah-wilayah terpencil. Padahal, pendidikan sangat perlu diperhatikan pada usia jenjang pendidikan regular SD sampai perguruan tinggi yang secara demografis dikategorikan dalam kelompok 7-24 tahun. Gambaran lebih jelas tentang Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Kelompok Umur Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

Usia Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Paser				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7-12	99.73	99.49	98.98	100.00	99.93
13-15	97.12	99.40	96.53	95.78	97.69
16-18	69.62	96.53	82.23	82.33	75.43

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2014-2017

Selama lima tahun terakhir, peningkatan pendidikan penduduk umur 10 tahun ke atas ditandai dengan menurunnya persentase penduduk berpendidikan rendah kemudian diikuti dengan meningkatnya persentase penduduk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada Tahun 2017, persentase penduduk Kabupaten Paser umur 10 tahun ke atas yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) masih cukup besar yaitu sekitar 51,19 persen, walau sebagian besar diantaranya adalah penduduk dewasa dan tua.

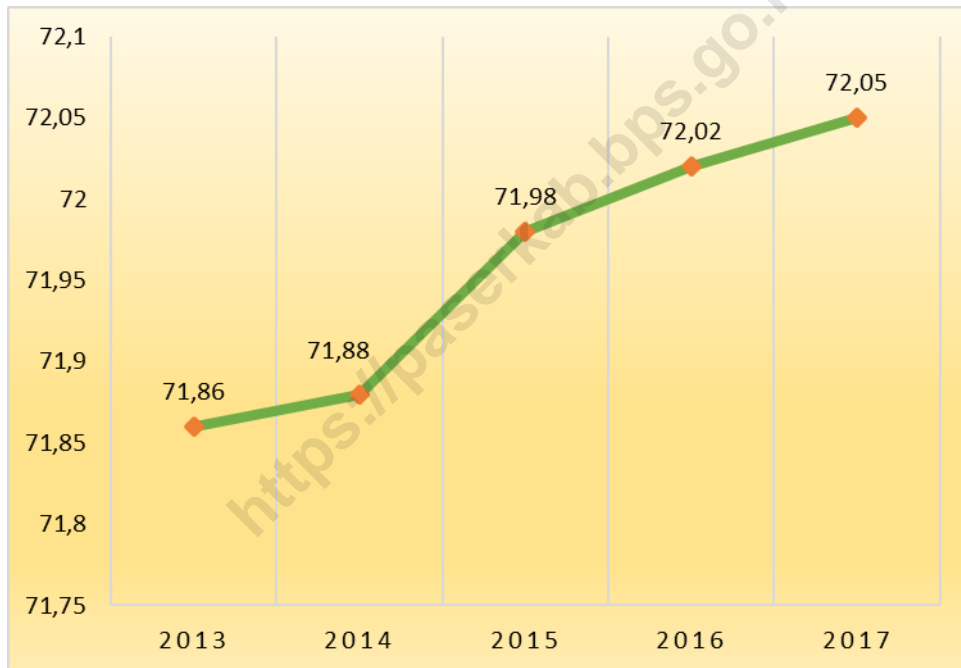


Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 4.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Paser Tahun 2017

### 4.3. Gambaran Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

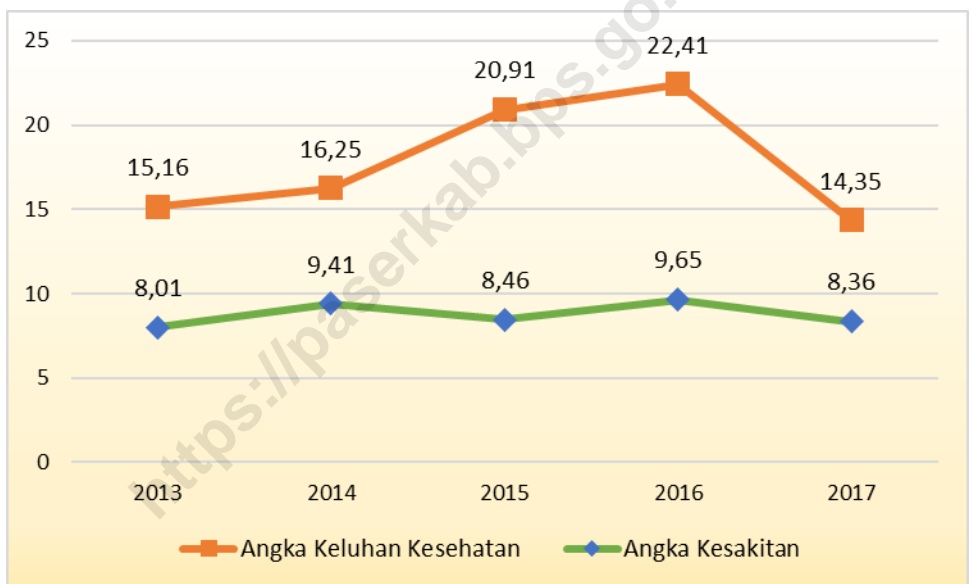


Sumber: BPS Kabupaten Paser

Gambar 4.4. Perkembangan AHH Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, khususnya dari sisi kesehatan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Paser mencapai 72,05 tahun pada tahun 2017. Angka ini bertambah 0,19 tahun selama lima tahun terakhir. Angka tersebut terhitung untuk Kabupaten Paser dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2010 akan dapat hidup sampai 72 atau 73

tahun. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Paser. Banyak hal dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemanfaatan teknologi kesehatan yang semakin canggih, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan AHH tersebut menunjukkan peningkatan derajat kesehatan Kabupaten Paser yang diikuti dengan berbagai program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya.



Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser

Gambar 4.5. Perkembangan Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan kesakitan. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan Gambar 4.5 , dapat dilihat bahwa selama tahun 2013-2017, perkembangan angka keluhan kesehatan dan angka kesehatan Kabupaten Paser berfluktuatif, bahkan *trend*-nya cenderung meningkat. Namun pada tahun 2017, baik angka keluhan kesehatan maupun angka kesakitan menurun.

Angka keluhan kesehatan Kabupaten Paser mencapai 14,35 persen pada tahun 2017, yang turun dari 22,41 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, angka kesakitan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 8,36 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Paser yang mengalami keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitasnya semakin menurun dari tahun sebelumnya dan juga menjadi harapan baru bagi pemerintah daerah untuk semakin menggiatkan program kesehatan yang telah dilaksanakan.

Kemiskinan seringkali menghambat penduduk miskin untuk dapat mengakses berbagai fasilitas kesehatan. Kebutuhan akan kesehatan tidak hanya berbicara tentang masalah kemampuan rumah tangga dalam membiayai kebutuhan pengobatan saja tetapi juga berbicara tentang kemampuan rumah tangga untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Perlu disadari bersama bahwa masih banyak rumah tangga atau penduduk yang bertempat tinggal cukup jauh dan sulit dari ketersediaan fasilitas kesehatan, yang mana untuk dapat mencapai fasilitas kesehatan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan pengobatannya. Namun demikian, pemerintah terus mengupayakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut dimanapun mereka bertempat tinggal. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Gambaran upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2017 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

<b>Fasilitas Kesehatan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Sakit	1	1	1	1	3
Rumah Bersalin	-	-	-	12	-
Puskesmas	17	17	17	18	19
Puskesmas Pembantu	104	118	96	-	109
Puskesmas Keliling	26	12	24	-	19
Posyandu	-	-	-	346	356
Polindes	-	-	-	63	38
Ambulan	16	32	27	-	30
Klinik Swasta	20	26	27	-	29

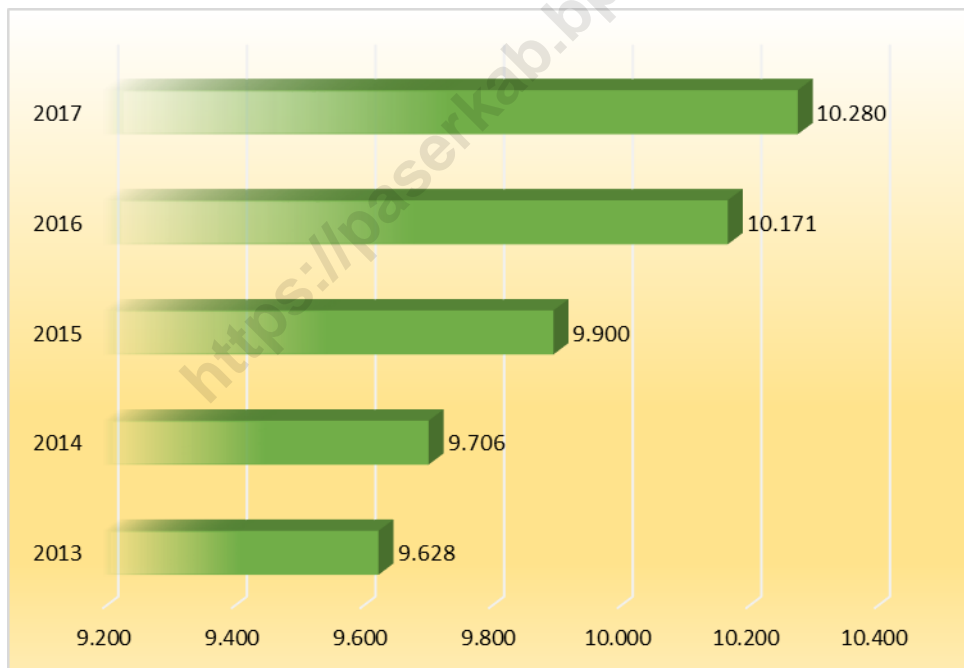
Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2014-2018



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi penambahan sebanyak 2 unit rumah sakit, 1 unit puskesmas, dan puskesmas pembantu. Hal ini sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser yang memiliki beberapa misi untuk meningkatkan kualitas kesehatan, yaitu pemerataan tenaga kesehatan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, dan pelayanan kesehatan penduduk miskin.

#### 4.4. Gambaran Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

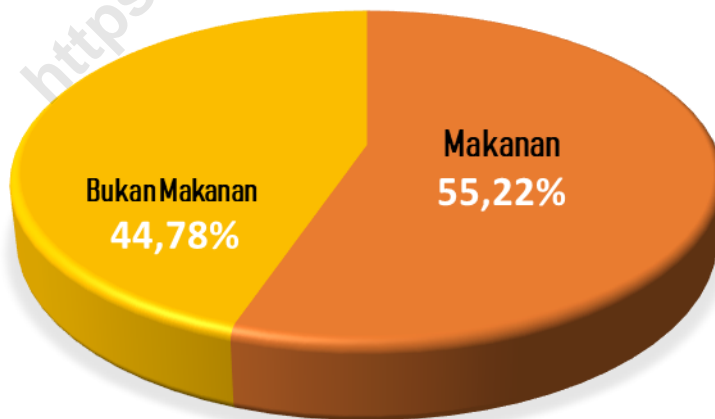


Sumber: BPS Kabupaten Paser

Gambar 4.6. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang disesuaikan Kabupaten Paser Tahun 2013-2017

Ukuran daya beli masyarakat diukur dengan pengeluaran per kapita selama setahun. Semakin tinggi pendapatan seseorang biasanya semakin tinggi pula tingkat belanja atau pengeluarannya. Rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan merupakan salah satu komponen penyusun IPM yang dapat diartikan sebagai daya beli. Daya beli adalah

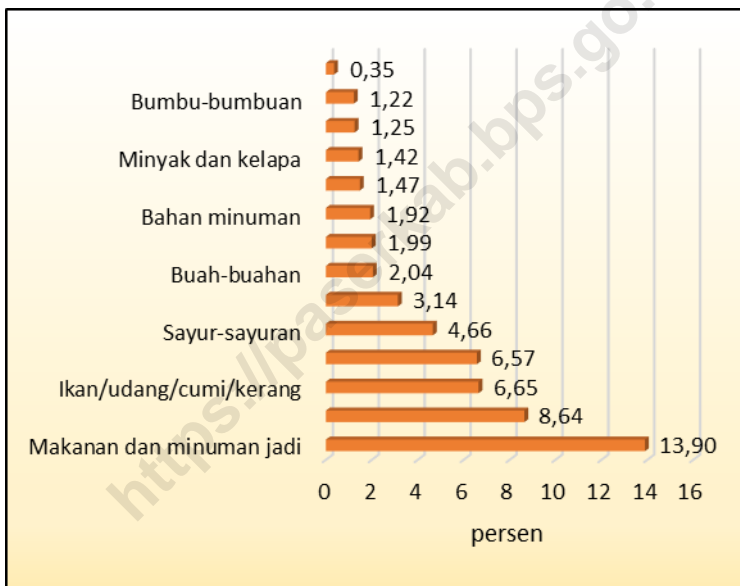
kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli tersebut mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Gambar 4.5 menunjukkan pengeluaran per kapita per tahun masyarakat Kabupaten Paser yang disesuaikan yaitu sebesar Rp 10.280.000,- rupiah pada tahun 2017. Hal ini berarti secara rata-rata kemampuan daya beli seseorang di Kabupaten Paser sebesar Rp 10.280.000,- per tahun atau Rp 856.667,- per bulan. Daya beli masyarakat Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp 652.000 dari sebelumnya sebesar Rp 9.628.000,- pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Paser terus membaik. Semakin meningkat kemampuan daya beli masyarakat yang berarti adanya dampak semakin membaiknya perekonomian Kabupaten Paser. Jika dibandingkan dengan rata-rata daya beli masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp 11.612.000,- per tahun, daya beli masyarakat Paser masih berada di bawah angka rata-rata provinsi, tertaut sekitar Rp 1.332.000,-. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan pengeluaran per kapita, pemerintah daerah diharapkan untuk mempersiapkan suatu strategi dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, seperti pembukaan kesempatan kerja baru dan penyiapan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2017

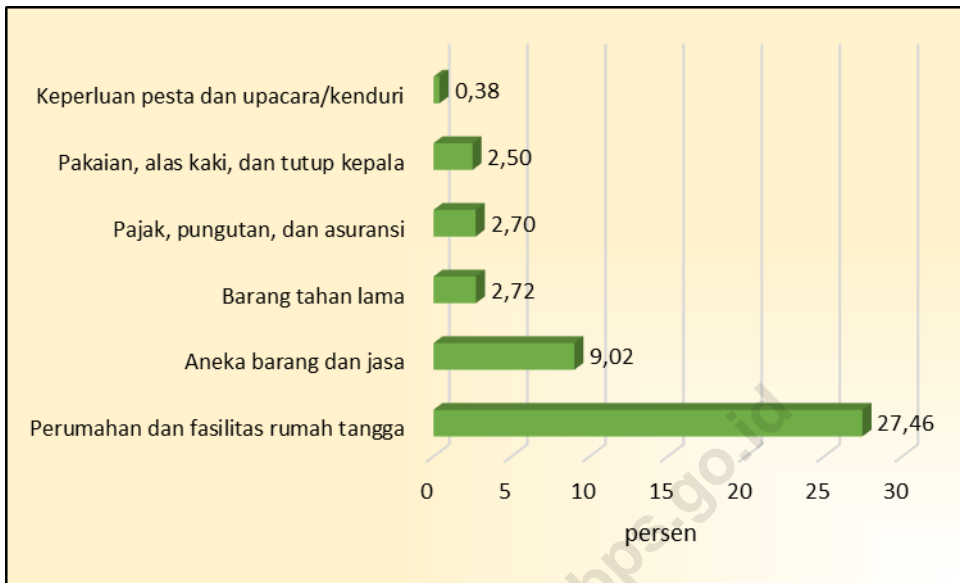
Gambar 4.7. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Paser tahun 2017 untuk makanan lebih besar daripada bukan makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Paser selama tahun 2017 untuk komoditas makanan secara total sekitar 55,22 persen dengan rincian terbesar terdapat pada pengeluaran komoditas makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 13,9 persen. Sementara itu, Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Paser selama tahun 2017 untuk komoditas bukan makanan secara total sekitar 44,78 persen dengan rincian terbesar terdapat pada pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 27,46 persen. Untuk rincian yang lebih detail dapat dilihat pada gambar 4.7 dan 4.8 sebagai berikut.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2017

Gambar 4.8. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang Makanan di Tahun 2017



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2017

Gambar 4.9. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang Non Makanan di Kabupaten Paser Tahun 2017

# PENUTUP





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data IPM tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- IPM Kabupaten Paser mengalami peningkatan dari 69,61 pada tahun 2013 menjadi 71,16 pada tahun 2017. Secara umum, IPM Kabupaten Paser tahun 2017 menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia dan termasuk dalam status pembangunan manusia pada level tinggi.
- Angka Harapan Hidup Kabupaten Paser mencapai 72,05 tahun pada tahun 2017.
- Rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Kabupaten Paser juga mengalami peningkatan. Tahun 2016 rata-rata lama sekolah 8,19 tahun menjadi 8,20 tahun di tahun 2017 dan angka harapan lama sekolah tahun 2016 sebesar 12,96 tahun menjadi 12,98 tahun di tahun 2017.
- Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun masyarakat Kabupaten Paser yang disesuaikan yaitu sebesar Rp 10.280.000,- rupiah pada tahun 2017. Hal ini berarti secara rata-rata kemampuan daya beli seseorang di Kabupaten Paser sebesar Rp 10.280.000,- per tahun atau Rp 856.666,67,- per bulan.

#### **5.2. Saran**

Program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah daerah sesuai RPJMD 2016-2021 kembali mengalami peningkatan. Hal ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi, khususnya program pendidikan wajib belajar 9 tahun dan diharapkan juga mampu memberikan solusi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi yang kurang mampu dikarenakan sebesar 33,46 persen penduduk Kabupaten Paser tahun 2017 memiliki ijazah SD dan sederajat.





# LAMPIRAN





**Tabel 1.**  
**Share Kelompok Komoditas dalam Perhitungan**  
**Paritas Daya Beli (PPP)**

No	Kelompok	Share kelompok
	<b>Makanan</b>	<b>55,22</b>
1	Padi-padian	6,57
2	Umbi-umbian	0,35
3	Ikan/udang/cumi/kerang	6,65
4	Daging	1,99
5	Telur dan susu	3,14
6	Sayur-sayuran	4,66
7	Kacang-kacangan	1,25
8	Buah-buahan	2,04
9	Minyak dan lemak	1,42
10	Bahan minuman	1,92
11	Bumbu-bumbuan	1,22
12	Konsumsi lainnya	1,47
13	Makanan dan minuman jadi	13,90
14	Tembakau dan sirih	8,64
	<b>Non makanan</b>	<b>44,78</b>
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	27,46
2	Aneka barang dan jasa	9,02
3	Pakaian, alas kaki, tutup kepala	2,50
4	Barang tahan lama	2,72
5	Pajak, pungutan, asuransi	2,70
6	Keperluan, pesta, upacara/kenduri	0,38
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2017

**Tabel 2. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, 2010-2017**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6400	KALIMANTAN TIMUR	72.89	73.10	73.32	73.52	73.62	73.65	73.68	73.70
<b>6401</b>	<b>Paser</b>	<b>71.8</b>	<b>71.83</b>	<b>71.85</b>	<b>71.86</b>	<b>71.88</b>	<b>71.98</b>	<b>72.02</b>	<b>72.05</b>
6402	Kutai Barat	71.74	71.82	71.90	71.96	72.03	72.19	72.28	72.37
6403	Kutai Kartanegara	71.41	71.44	71.46	71.48	71.50	71.60	71.64	71.68
6404	Kutai Timur	72.08	72.16	72.23	72.30	72.37	72.39	72.45	72.51
6405	Berau	70.99	71.05	71.10	71.15	71.21	71.31	71.37	71.44
6409	Penajam Paser Utara	70.28	70.34	70.40	70.43	70.48	70.53	70.80	70.82
6411	Mahakam Ulu	70.83	70.91	70.98	71.05	71.12	71.13	71.19	71.25
6471	Kota Balikpapan	73.9	73.91	73.92	73.93	73.94	73.95	73.96	73.97
6472	Kota Samarinda	73.49	73.53	73.56	73.59	73.63	73.65	73.68	73.71
6474	Kota Bontang	73.63	73.65	73.66	73.67	73.68	73.69	73.71	73.72

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, 2010-2017**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6400	KALIMANTAN TIMUR	11.87	12.06	12.46	12.85	13.17	13.18	13.35	13.49
<b>6401</b>	<b>Paser</b>	<b>10.91</b>	<b>11.13</b>	<b>11.88</b>	<b>12.52</b>	<b>12.63</b>	<b>12.65</b>	<b>12.96</b>	<b>12.98</b>
6402	Kutai Barat	11.01	11.54	11.57	11.58	12.14	12.30	12.75	12.82
6403	Kutai Kartanegara	11.59	11.79	12.11	12.96	13.24	13.25	13.26	13.56
6404	Kutai Timur	11.01	11.30	11.59	12.12	12.42	12.43	12.44	12.48
6405	Berau	11.36	12.02	12.06	12.86	12.96	13.17	13.18	13.29
6409	Penajam Paser Utara	11.26	11.32	11.39	11.45	11.69	12.02	12.46	12.53
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	11.82	11.87	12.03	12.42	12.47
6471	Kota Balikpapan	12.07	12.27	12.47	13.15	13.43	13.46	13.59	13.75
6472	Kota Samarinda	13.07	13.52	13.64	13.76	14.16	14.17	14.23	14.64
6474	Kota Bontang	11.80	11.94	12.12	12.50	12.68	12.77	12.79	12.88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, 2010-2017**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6400	KALIMANTAN TIMUR	8.56	8.79	8.83	8.87	9.04	9.15	9.24	9.36
<b>6401</b>	<b>Paser</b>	<b>7.48</b>	<b>7.60</b>	<b>7.78</b>	<b>7.96</b>	<b>7.99</b>	<b>8.12</b>	<b>8.19</b>	<b>8.20</b>
6402	Kutai Barat	7.26	7.46	7.53	7.89	7.98	8.02	8.03	8.06
6403	Kutai Kartanegara	7.68	8.13	8.35	8.41	8.46	8.68	8.71	8.83
6404	Kutai Timur	7.92	8.12	8.39	8.56	8.60	8.69	8.72	9.06
6405	Berau	7.91	8.25	8.34	8.52	8.53	8.62	8.78	8.96
6409	Penajam Paser Utara	6.87	7.07	7.09	7.30	7.46	7.59	7.60	7.95
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	6.86	7.15	7.36	7.37	7.68
6471	Kota Balikpapan	10.02	10.16	10.29	10.39	10.41	10.44	10.54	10.55
6472	Kota Samarinda	9.42	9.97	10.00	10.20	10.26	10.31	10.33	10.34
6474	Kota Bontang	10.21	10.22	10.28	10.34	10.35	10.38	10.39	10.70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 5. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan  
Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, 2010-2017**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6400	KALIMANTAN TIMUR	10790	10927	10944	10981	11019	11229	11355	11612
<b>6401</b>	<b>Paser</b>	<b>9004</b>	<b>9139</b>	<b>9150</b>	<b>9628</b>	<b>9706</b>	<b>9900</b>	<b>10171</b>	<b>10280</b>
6402	Kutai Barat	8632	8746	8801	9228	9262	9380	9492	9532
6403	Kutai Kartanegara	9063	9263	9281	9866	9984	10250	10593	10692
6404	Kutai Timur	8652	8801	9049	9297	9484	9704	9960	10273
6405	Berau	10913	11002	11188	11375	11471	11572	11675	11843
6409	Penajam Paser Utara	9874	10069	10199	10773	10807	10913	11019	11126
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	7036	7071	7162	7281	7364
6471	Kota Balikpapan	12813	12922	13127	13333	13439	13705	13883	14254
6472	Kota Samarinda	13061	13128	13292	13455	13538	13825	14010	14175
6474	Kota Bontang	15096	15271	15318	15820	15878	15980	16157	16271

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, 2010-2017**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6400	KALIMANTAN TIMUR	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12
<b>6401</b>	<b>Paser</b>	<b>66.54</b>	<b>67.11</b>	<b>68.18</b>	<b>69.61</b>	<b>69.87</b>	<b>70.30</b>	<b>71.00</b>	<b>71.16</b>
6402	Kutai Barat	65.90	66.92	67.14	68.13	68.91	69.34	69.99	70.18
6403	Kutai Kartanegara	67.45	68.47	69.12	70.71	71.20	71.78	72.19	72.75
6404	Kutai Timur	66.94	67.73	68.71	69.79	70.39	70.76	71.10	71.91
6405	Berau	69.16	70.43	70.77	72.02	72.26	72.72	73.05	73.56
6409	Penajam Paser Utara	66.37	66.92	67.17	68.07	68.60	69.26	69.96	70.59
6411	Mahakam Ulu				63.81	64.32	64.89	65.51	66.09
6471	Kota Balikpapan	75.55	76.02	76.56	77.53	77.93	78.18	78.57	79.01
6472	Kota Samarinda	75.85	77.05	77.34	77.84	78.39	78.69	78.91	79.46
6474	Kota Bontang	76.97	77.25	77.55	78.34	78.58	78.78	78.92	79.47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 7. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, 2010-2017**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6400	KALIMANTAN TIMUR	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>6401</b>	<b>Paser</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
6402	Kutai Barat	9	9	9	8	8	8	8	9
6403	Kutai Kartanegara	5	5	5	5	5	5	5	5
6404	Kutai Timur	6	6	6	6	6	6	6	6
6405	Berau	4	4	4	4	4	4	4	4
6409	Penajam Paser Utara	8	8	8	9	9	9	9	8
6411	Mahakam Ulu				10	10	10	10	10
6471	Kota Balikpapan	3	3	3	3	3	3	3	3
6472	Kota Samarinda	2	2	2	2	2	2	2	2
6474	Kota Bontang	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 8. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, 2010-2017**

Kode	Provinsi/Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6400	KALIMANTAN TIMUR	-	1.01	0.82	0.81	0.83	0.48	0.56	0.71
<b>6401</b>	<b>Paser</b>	-	<b>0.85</b>	<b>1.60</b>	<b>2.10</b>	<b>0.36</b>	<b>0.62</b>	<b>1.00</b>	<b>0.23</b>
6402	Kutai Barat	-	1.55	0.34	1.47	1.15	0.61	0.94	0.27
6403	Kutai Kartanegara	-	1.51	0.94	2.31	0.68	0.83	0.56	0.78
6404	Kutai Timur	-	1.18	1.43	1.57	0.87	0.52	0.49	1.14
6405	Berau	-	1.83	0.48	1.77	0.33	0.64	0.45	0.70
6409	Penajam Paser Utara	-	0.83	0.37	1.34	0.78	0.95	1.02	0.90
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	-	0.80	0.88	0.96	0.89
6471	Kota Balikpapan	-	0.63	0.71	1.26	0.52	0.33	0.50	0.56
6472	Kota Samarinda	-	1.58	0.38	0.65	0.70	0.38	0.29	0.70
6474	Kota Bontang	-	0.36	0.39	1.02	0.30	0.25	0.18	0.70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PASER**

Jl. Gajah Mada No. 76 Tana Paser

Telp: (0543)21219

E-mail: [bps6401@bps.go.id](mailto:bps6401@bps.go.id)

Homepage: [paserkab.bps.go.id](http://paserkab.bps.go.id)